

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM
KAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

EDWARD RIDUAN, SH

1902190076



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : Edward Riduan, S.H.

NIM : 1902190076

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Ilmu Hukum Pidana

Judul : TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Dibuat dan diselesaikan dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya akhir ini di anggap bata.

Jakarta, 18 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,

Edward Riduan, S.H



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KAITAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Oleh :

Nama : Edward Riduan, S.H.
NIM : 1902190076
Program : Magister Hukum
Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana
Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas
Kristen Indonesia.

Jakarta, 18 Maret 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

(Prof. Dr. Mompang L. Panggabean., S.H, M.Hum)

Program Studi Hukum Program Magister

Ketua

(Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Dr. Djerrih Sitanggang, Bc.IP., S.H, MH)

Program Pasca Sarjana

Direktur



(Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 18 Maret 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Edward Riduan, S.H.

NIM : 1902190076

Program : Magister Hukum

Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN", oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean., S.H, M.Hum	Ketua	
2. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP, S.H, M.H	Sebagai Anggota	
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S	Sebagai Anggota	

Jakarta, 18 Maret 2022

Catatan :



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edward Riduan, S.H.
NIM : 1902190076
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Ilmu Hukum Pidana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan
Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Kaitan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,

Edward Riduan, S.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini tepat waktu. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai saat Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Adapun judul dari Tesis adalah : **TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMNISTRASI PEMERINTAHAN.**

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis yang berkaitan dengan akademik.
2. Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang berharga untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang telah yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang berharga untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
4. Kedua orangtua terkasih beserta Keluarga Besar S. Manalu/ Br. Sibagariang, Pasanganku serta Rekan-Rekan Kerja “Mart & Partners” dan Rekan-Rekan Mahasiswa Magister Hukum Pidana Angkatan 2019/2020 yang telah menemani selama proses penyelesaian tesis dan selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

Jakarta, 09 Maret 2022

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
D. Landasan Teori Konseptual	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
2. Kerangka Konseptual	26
E. Metode Penelitian	27
1. Tipe Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Sifat Peneltian	28
4. Data dan Sumber Data	29
5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	32
6. Analisis Bahan Hukum	32
F. Sistematika Penulisan	33
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Landasan Teori	35
B. Definisi dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi	48

C. Kekuasaan dan Kewenangan	60
D. Peradilan Tata Usaha Negara	71

BAB III - PEMBAHASAN UNSUR PENYALAHGUNAAN	
WEWENANG PADA PTUN DALAM KAITANNYA DENGAN	
TINDAK PIDANA KORUPI	78
A. Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Pada PTUN Dalam	
 Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi	78
1. Jangka Waktu Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada	
PTUN	78
2. Prosedur Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap	
PTUN	85
B. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi ...	89
1. Definisi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi ..	89
2. Unsur-Unsur Dipenuhi Pada Kejahatan Tindak Pidana Korupsi	
Dalam Perspektif Kewenangan/Pejabat Publik	95

BAB IV – PEMBAHASAN KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBERANTASAN	
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG	
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-	
UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	127
A. Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif	
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20	
 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	127
1. Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana	127
2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Praktik Korupsi	134
B. Tindak pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara..	143
C. Strategi Pemberantasan Korupsi dan Pencegahan Korupsi Perspektif	
 Hukum Administrasi Negara	146

BAB V - PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran	178
DAFTAR PUSTAKA	180



ABSTRAK

Nama : EDWARD RIDUAN, SH.
NIM : 1902190076
Program Studi/Kekhususan : Hukum / Hukum Pidana
Judul Tesis :Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Kaitan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penyelesaian tindak pidana korupsi yang sering menemui titik persinggungan atau pertautan (*aanknopingspunten*) antar bidang hukum administrasi dengan hukum pidana. Merujuk pada permasalahan tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pejabat pemerintah dalam hal ini penyalahgunaan kewenangan dikaji dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelaahan pandangan hukum administrasi negara dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat pemerintah didasari atas kualifikasi tindakan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, penelitian ini ingin menganalisis kebijakan kriminal yang berlaku menurut perspektif undang-undang tipikor dan undang-undang administrasi pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif yang mengola sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur lainnya. Penentuan tindakan penyalahgunaan wewenang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan harus dikategorikan sebagai *species delict* dari unsur melawan hukum *genus delict* dan kebijakan kriminal yang berlaku mengacu pada metode sistematik structural, metode absolutionistik dan metode moralistik. Formulasi ini dilegalisasi dalam kebijakan pidana antara undang-undang nomor 3 tahun 1971 dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 oleh karena itu, diharapkan agar seluruh *stakeholders* khususnya pejabat pemerintahan dalam memaknai dan mengaktualisasikan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan serta mewujudkan sinergitas antara struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi Pemerintahan.

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of the settlement of criminal acts of corruption which often meet the point of intersection or linkage (aanknopingspunten) between the fields of administrative law and criminal law. Referring to these problems, the settlement of cases of corruption by government officials, in this case the abuse of authority, is studied in the perspective of state administrative law. The review of the legal views of state administration in resolving cases of abuse of office authority by government officials is based on the qualifications of actions that are included in criminal acts of corruption. In the context of preventing corruption, this study wants to analyze the criminal policies that apply from the perspective of the corruption law and government administration law. This research is a normative juridical research with descriptive typology that manages primary and secondary empirical data sources from books, documents, journals, or other literature. The determination of acts of abuse of authority is the authority of the State Administrative Court. In the context of corruption, abuse of authority must be categorized as a species offense from elements against the law of the genus delict and the applicable criminal policy refers to the structural systematic method, the abolitionistic method and the moralistic method. This formulation was legalized in the criminal policy between Law No. 3 of 1971 and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. Therefore, it is hoped that all stakeholders, especially government officials, in interpreting and actualizing power and authority in office. and to create synergy between the legal structure and legal culture.

Keywords : Corruption, Abuse Of Authority, Government Administration.